

## Jakarta di Bawah Kepemimpinan “Gubernur Sampah” Soemarno Sosroatmodjo (1960-1966)

Karina Septiani<sup>1</sup>, Kurniawati<sup>2</sup> Nur'aeni Marta<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta  
e-mail: [sujanakarina@gmail.com](mailto:sujanakarina@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pola kepemimpinan Soemarno Sosroatmodjo. Sosok bersahaja yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta yang pertama. Nama Soemarno tidak banyak diperbincangkan oleh khalayak, tetapi peninggalannya seperti Pasar Senen, Pasar Cikini, Kawasan Cempaka Putih, Pulo Mas serta Tebet menjadi warisan yang dapat kita nikmati hingga saat ini di Ibu Kota Jakarta. Adapun, kebijakan yang menjadi ciri khas pada era Soemarno adalah kebijakan yang berkaitan dengan sampah yang nantinya saling berkaitan dengan kebijakannya dalam menangani banjir. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis historis. Teori yang peneliti gunakan adalah Politik Kota. Sehingga dalam penelitiannya, peneliti juga membandingkan pola kepemimpinan pemangku kebijakan sebelum Soemarno serta didukung dengan permasalahan yang Jakarta alami. Titik berat peneliti adalah bagaimana Soemarno dengan latar belakangnya sebagai dokter tentara membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat Jakarta. Hal ini selaras dengan poin penting dalam politik perkotaan bahwa sebuah kota akan berkembang sesuai dengan bagaimana rancangan program kerja pemimpinnya. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan Soemarno dinilai berhasil untuk membuat program kerja yang dikhususkan untuk masyarakat Jakarta. Hal ini bisa dibuktikan dengan seimbangannya pembangunan infrastrukural monumental dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jakarta pada tahun 1960-an. Penelitian ini dinilai krusial karena diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemangku kebijakan Jakarta dalam menangani permasalahan banjir.

**Kata kunci:** *Soemarno Sosroatmodjo, Pembangunan Jakarta, Banjir Jakarta*

### Abstract

This study aims to examine the leadership pattern of Soemarno Sosroatmodjo. An unpretentious figure who was elected as the first Governor of Jakarta. Soemarno's name is not widely discussed by the public, but his relics such as Pasar Senen, Pasar Cikini, Cempaka Putih Area, Pulo Mas and Tebet are legacies that we can enjoy until this day in the capital city of Jakarta. Meanwhile, the policies that became the hallmark of the Soemarno era

were policies related to waste which would later be interrelated with his policies in dealing with floods. Researchers used descriptive historical analysis research methods. Meanwhile, the theory that researchers use is City Politics. So that in his research, researchers also compare the leadership patterns of policy makers before Soemarno and are supported by the problems that Jakarta is experiencing. The focus of the researcher is how Soemarno with his background as a military doctor makes policies related to the public interest of the people of Jakarta. This is in line with an important point in urban politics that a city will develop according to how its leader's work program is designed. The results of this study indicate that Soemarno's policy is considered successful in creating a work program specifically for the people of Jakarta. This can be proven by the balance of monumental infrastructure development and development for the benefit of the people of Jakarta in the 1960s. This research is considered crucial because it is expected to be an inspiration for Jakarta's policy makers in dealing with flood problems

**Keywords :** *Soemarno Sosroatmodjo, Jakarta's development, Jakarta's flood*

## PENDAHULUAN

Kota Jakarta sebagai Ibukota Indonesia menyimpan banyak sekali masalah yang diakibatkan karena kelebihan penduduk. Semakin tahun, semakin banyak masalah yang harus dihadapi terutama berkenaan dengan banjir dan tempat tinggal. Didasari hal ini, banyak sekali upaya-upaya pemerintah pusat lakukan untuk membenahi Kota Jakarta. Salah satunya adalah perubahan status administrasi Kota Jakarta pada tahun 1959 menjadi kota administrasi tingkat satu. Selanjutnya, di tahun yang sama, status Kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I). Dikarenakan perubahan status ini, mengakibatkan perubahan instrumen yang tadinya dipimpin oleh walikota menjadi gubernur yang pada masa kolonial diangkat oleh pemerintah pusat. (Blackburn, 1989, p. 230)

Selain alasan historis, perubahan status Kota Jakarta menjadi Dati I juga didasari dengan alasan agar bisa lebih terfokus dalam menyelesaikan masalah yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa memimpin Ibu Kota Jakarta tentu bukan suatu hal yang mudah. Dilihat dari segi masyarakatnya, masyarakat Jakarta merupakan masyarakat yang multikultural. Tentu, tidak mudah dalam mengatur masyarakat yang memiliki adat-istiadat serta kebiasaan yang berbeda. Sejarah mencatat, sebelum Jakarta berubah status menjadi Dati I, ada 3 pemimpin yang pernah menduduki kursi Wali Kota Jakarta. Sebut saja Soewirjo, Sjamsuridjal dan Sudiro. 3 Pemimpin Jakarta ini ditantang melawan bayang-bayang kolonialisme yang masih melekat dengan erat dalam sudut-sudut Kota Jakarta untuk menciptakan Jakarta wajah baru. Seperti yang kita pahami, identitas sebagai bangsa yang merdeka tidak semata-mata diraih dengan deklarasi kemerdekaan. Aspek budaya, sosial, ekonomi, politik dan semua aspek kehidupan bermasyarakat masih banyak yang terintervensi oleh warisan kolonialisme (Zed, 2017)

3 pemimpin ini bahu membahu membangun Kota Jakarta. Soewirjo sebagai wali kota pertama, memfokuskan Kota Jakarta dengan unsur nasionalisme yang kuat. Hal ini Soewirjo

wujudkan dikarenakan situasi Indonesia masih dalam suasana pasca kemerdekaan. Soewirjo melakukan nasioalisme pemerintahan dan kekuasaan kota. Selanjutnya, estafet kekuasaan itu dilanjutkan oleh Sjamsuridjal. Pemimpin yang pernah menjabat menjadi Wali Kota Surakarta ini membangun stadion nasional IKADA (Ikatan Atletik Djakarta) yang dimulai pada 18 Juli 1950 untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional ke-2 (PON II) yang dilaksanakan pada Oktober 1951. Sjamsuridjal juga fokus memberi prioritas pada masalah air minum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan atas tanah.

Kursi wali kota terakhir sebelum berganti menjadi Gubernur diduduki oleh Sudiro. Meskipun banyak tantangan dikarenakan Kota Jakarta merupakan tempat utama akan konflik kebijakan antara kebijakan kota dan kebijakan nasional. Pada masa jabatannya, dia menyatakan bahwa ada 3 daerah teritoris utama di Jakarta: Bandara Kemayoran (Mewakili Jakarta Pusat), Pelabuhan Tanjung Priok (Mewakili Jakarta Utara) dan kota satelit Kebayoran Baru (Mewakili Jakarta Selatan). Pada 1957, Sudiro membuat kebijakan sekolah gratis untuk tingkat sekolah dasar (SD), namun kebijakan ini hanya berlaku 1 tahun karena pemerintah pusat membatalkan kebijakan ini.

Akan tetapi, meskipun kebijakan para wali kota ini sudah semaksimal mungkin diarahkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Jakarta, tidak jarang banyak kritik bermunculan. Wali Kota Jakarta dianggap hanya menjadi pemimpin bayangan karena kebijakan seutuhnya dilaksanakan oleh Soekarno. Padahal, wali kota merupakan salah satu 'aktor politik' yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah perkotaan. Alasannya adalah wali kota merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang mengelola kota dan membuat kebijakan sebagai pelayan publik serta wali kota memiliki jangkauan yang 'lebih dekat' dengan penduduk dibandingkan pemerintahan pusat.

Tetapi, pada kondisi saat itu Soekarno memiliki andil yang lebih untuk membangun Kota Jakarta. Hal ini dikarenakan regulasi dan kebijakan yang berporos pada pemerintah pusat. Soekarno mengaktualisasikan Jakarta wajah baru dengan pembuatan Outline Plan. Outline Plan ini dibuat ketika Kotapraja Jakarta di bawah kepemimpinan Walikota Sudiro (1953-1959). Soekarno dan Sudiro merumuskan pembangunan Jakarta dalam empat hal terpenting yaitu wisma (rumah), karya (lapangan kerja), marga (transportasi) dan suka yang mencakup rekreasi dan fasilitas umum (Farabih, 2005, p. 3)

Soekarno seolah memproklamkan bahwa Jakarta dapat menjadi kota yang terbebas dari belenggu kolonialisme. Cara Soekarno untuk terlepas dari belenggu kolonialisme ini adalah dengan cara aktualisasi diri yang diwujudkan dalam pembangunan empat infrastruktur. Aktualisasi diri ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan memiliki identitas baru. Soekarno jatuh cinta dengan romantika revolusi yang ia anggap memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual bangsa Indonesia.

Sayangnya, pada awal tahun 1950-an, Soekarno dan Sudiro hanya terfokus untuk mempercantik Kota Jakarta, tetapi tidak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada. Cita-cita Soekarno tampaknya sangat utopis dan jauh dari kata tercapai. Jakarta hanya kuat dalam hal retorika dan simbol namun lemah dalam tindakan revolusioner yang nyata (Blackburn, 1989, p. 272). Hal ini juga dilatarbelakangi dengan

situasi dan kondisi politik Jakarta pada masa kemerdekaan, Soekarno baru bisa menjadi pemimpin yang seutuhnya ketika masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1965.

Kebijakan-kebijakan yang banyak berkenaan dengan masalah kehidupan rakyat Ibukota akhirnya tercetus oleh Soemarno Sosroatmodjo, ia merupakan seorang gubernur pertama yang memimpin Kota Jakarta dan berlatar belakang sebagai seorang dokter tentara. Soemarno merupakan sosok militer pertama yang menjadi gubernur. Adapun, Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Berbagai dinamika tatanan Kota Jakarta dihadapi Soemarno pada masa awal kepemimpinannya. Sebut saja ketika tahun 1961, ketika status Djakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI, sekarang dieja Daerah Khusus Ibukota/DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Soemarno. Bahkan pada tahun 1965 tepatnya pada bulan Agustus, Soekarno mempercayakan Soemarno untuk menduduki 2 jabatan sekaligus yakni Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jakarta. Hal ini bukan tanpa alasan, Soekarno mempercayakan dua jabatan tersebut kepada sosok Soemarno karena latar belakang karir sebagai dokternya yang cemerlang dan jasanya dalam pembentukan KOWAD (Prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Darat).

Memiliki latar belakang pendidikan sebagai dokter tentara menjadikan Soemarno sebagai sosok yang sangat peduli kepada rakyat. Kebijakan yang sangat berporos dengan kesejahteraan rakyat adalah penanggulangan sampah, pembuatan pasar dan pembangunan rumah minimum. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan Soemarno tidak hanya berkuat terhadap kecantikan dan tata Kota Jakarta tetapi berfokuskan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta. Soemarno juga berpendapat bahwa masalah banjir, kebakaran, sampah dan kesehatan rakyat merupakan soal yang saling kait-mengait dan harus ditanggulangi secara serempak, Soemarno juga berpendapat bahwa permasalahan perkampungan adalah permasalahan yang krusial dan harus segera ditindaklanjuti karena kampung yang kotor dan jorok merupakan sumber dari penyakit. (Sosroatmodjo, 1981, p. 281)

Soemarno tidak bekerja sendirian, berbagai macam buah pemikirannya juga terinspirasi dari istrinya yang juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan Yayasan Penderita Anak Cacat. Hal ini semakin menguatkan bahwa kebijakan-kebijakannya sangat berporos kepada kebutuhan rakyat Berangkat dari salah satu ungkapan Soemarno dalam otobiografinya, yakni "Bantu hindari kecemasan rakyat sehari-hari dengan memberinya kemampuan membantu diri sendiri dan mengatasi masalahnya sendiri." menjadi salahsatu landasan peneliti untuk meneliti sosok Soemarno lebih dalam lagi. Ungkapan ini dirasa menarik karena Soemarno dinilai peneliti sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya memberdayakan rakyat dengan cara memfasilitasi dan memanjakan rakyat dengan fasilitas-fasilitas dan progam pemerintah, tetapi dengan melibatkan rakyat untuk bergotong royong membangun Jakarta.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik historis yaitu heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Adapun, alasan

kenapa topik ini layak diteliti karena banjir dan sampah merupakan permasalahan yang sangat relevan dan krusial di Ibu Kota Jakarta. Peneliti menemukan sedikitnya 2 buku dan 1 penelitian yang terfokus oleh Soemarno Sostroatmodjo, yakni buku *Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya* yang merupakan otobiografi yang ditulis sendiri oleh Soemarno yang berisi tentang strategi dan cara-cara Soemarno dalam memimpin Kota Jakarta, Buku *Bukit Kenangan* karya Armistiani Soemarno yang berisi sudut pandang istri Soemarno terhadap kebijakan-kebijakan yang Soemarno buat dan penelitian yang ditulis oleh Christopher Silver yang berjudul *Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century* yang berisi tentang dinamika Kota Jakarta secara umum dari tahun ke tahun. Tahap verifikasi peneliti lakukan dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sidharta Soemarno selaku anak pertama dan Bapak Adri Sidharta selaku cucu pertama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fluktuasi Penduduk Jakarta Awal Kemerdekaan**

Pada awal kemerdekaan, lonjakan pertumbuhan penduduk Jakarta terus-menerus mengalami kondisi fluktuatif. Faktor awal yang mempengaruhi laju kenaikan penduduk adalah euforia akan kemerdekaan. Sebagai tempat kedudukan pemerintah yang tertinggi, Jakarta seolah menjanjikan bahwa kemerdekaan akan membawa kemakmuran dan harapan bagi para penduduk pedesaan. Banyak dari mereka yang datang dari wilayah-wilayah sangat padat di Jawa dan akhirnya datang ke Jakarta dengan sejuta harapan. Padahal, kondisi Jakarta belum dikatakan stabil untuk kota yang layak huni. Manajemen pemerintahan saat itu lebih menitikberatkan pada penyediaan pelayanan dasar kepada rakyat yang kondisinya sangat memprihatinkan dalam situasi politik yang belum stabil.

Estafet pemerintahan Jakarta yang tadinya dikuasai oleh Hasegawa selaku pihak Jepang diberikan kepada Suwirjo. Hal ini diinisiasi oleh Martaamidjaja dalam rangka memindahkan kekuasaan Indonesia dari tangan Jepang. Meskipun awalnya Hasegawa tidak mengabdikan permintaan itu, akhirnya pada keesokan harinya pemerintah Indonesia berinisiasi untuk mengangkat sumpah di Balai Kota Jakarta. Akhirnya, secara otomatis semua pegawai Jepang mengundurkan diri dan tidak masuk kantor lagi. Suwirjo bekerja didampingi Bagindo Dahlan Abdullah sebagai wakil dan Suratno Sastroatmodjo sebagai sekretaris. (Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977, p. 19)

Pada masa pemerintahan Suwirjo, tidak banyak perubahan baik secara infrastrukturnal maupun kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat. Kacaunya situasi politik pada masa Suwirjo bisa menjadi alasan mengapa hal tersebut terjadi. Bahkan, pada tanggal 21 Juli 1947, Suwirjo ditangkap oleh Pemerintah Belanda sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. (Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977, p. 37). Saat Suwirjo kembali ke Jakarta, terhitung akhir tahun 1947, Suwirjo mulai membenahi urusan petanahan, Suwirjo memfokuskan perhatiannya kepada persoalan tanah yang melanggar hukum. Setelah mengadakan rapat dengan Badan Pemerintah Harian, Suwirjo memutuskan untuk menetapkan penunjukan koordinator semua dinas yang bersangkutan dengan pembangunan fisik kota. Segala usaha akan dijalankan oleh Kotapraja untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang tidak sah dengan cara yang tegas dan bijaksana. Tabrani

Notosoedirjo selaku Dewan Perwakilan Rakyat Kota juga mengusulkan untuk menegakkan urusan tanah mengenai nama, luas, tujuan pemakaian, mulai kapan dan lain-lainnya. (Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977, p. 39)

Akhirnya, pada tahun 1950 ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai pertanahan. Adapun, peraturan tersebut berisi;

- 1) Tanah-tanah persil perpetakan yang sudah merupakan perpetakan untuk bangunan yang telah diokupasi oleh orang yang telah dijanjikan akan diberi hak atas tanah untuk mendirikan tanah
- 2) Tanah-tanah yang belum termasuk perpetakan, yang dipakai dengan tidak sah, sementara pemakaian dapat dilegalisasi dengan perjanjian sewa menyewa yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan, dengan syarat bahwa tanah harus diserahkan kembali kepada kotapraja atau kepada Negara, jika rencana kota dilaksanakan dan memerlukan persil (sebidang tanah dalam ukuran tertentu) yang dipakai tadi, bilamana okupasi tidak dapat disesuaikan dengan rencana kota tersebut
- 3) Mengenai tanah yang dipakai, tanpa rencana perpetakannya yang menyalahi rencana kota atau pemandangan dan atau yang dapat membahayakan, seperti okupasi dipinggir jalan, dipinggir kali dan sebagainya, harus selekas mungkin diusahakan pemindahan atau pengusiran pemakai tidak sah.

Sayangnya permasalahan tanah yang menjadi fokus utama Suwirjo kurang berpengaruh pada masyarakat Jakarta. Selain itu, budaya jual beli Surat Izin Perumahan yang selanjutnya disebut sebagai SIP masih marak terjadi pada era pemerintahan Suwirjo. Budaya ini sebenarnya merupakan warisan dari kolonialisme yang praktiknya masih marak sampai awal kemerdekaan.

### **Permasalahan Banjir dan Kebakaran di Jakarta**

Setelah mengalami laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif sampai tiga tahun berturut-turut, pada tahun 1948 dan 1949 jumlah penduduk Jakarta mengalami penambahan yang drastis, yaitu menjadi 823.356 orang pada tahun 1948 atau naik 37,2 persen dan naik lagi lebih tinggi pada tahun 1949, yaitu 1.340.625 orang atau naik 62,8 persen. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk ini diduga sebagai akibat dari masuknya arus migrasi pertama yang terbesar dalam periode setelah kemerdekaan serta situasi politik yang mulai stabil. (Blackburn, 1989, p. 233)

Jika Soewirjo memfokuskan Jakarta kepada stabilitas politik dan masalah tanah, Sjamsuridjal selaku penggantinya lebih memfokuskan kepada pembangunan Jakarta. Dilihat dari latar belakangnya, Sjamsuridjal merupakan walikota pertama Jakarta yang diusung melalui Partai Politik Islam yakni Masyumi. Masalah tanah dan pembangunan yang belum terurus oleh Soewirjo menjadi efek domino bagi permasalahan di Kota Jakarta yang nantinya diurus oleh Sjamsuridjal. Jika masalah tanah tidak diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah, otomatis penduduk Jakarta bisa mendirikan bangunan 'sesuka hati' tanpa memedulikan regulasi yang berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan kebutuhan tempat tinggal penduduk yang semakin meningkat akibat lonjakan penduduk di Jakarta.

Lonjakan penduduk yang terjadi di Jakarta juga disebabkan karena Jakarta merupakan kota yang memiliki daya tarik bagi kaum migran. Dengan semakin

berkembangnya pembangunan yang dicanangkan dalam banyak bidang, maka bertambah pula perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja inilah yang menjadi daya tarik bagi mereka yang telah mendapat dorongan untuk meninggalkan tempat asalnya. Jakarta menarik para migran dari daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan lain karena berbagai alasan. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah karena kehidupan kota yang penuh gemerlapan, kemungkinan melanjutkan pendidikan dan harapan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan. Faktor-faktor lain yang mendukung laju pertumbuhan penduduk dilihat dari sisi fasilitas desa yakni desa acapkali belum memiliki lapangan pekerjaan yang merata, keterbatasan lembaga pendidikan serta kurangnya sarana dan prasarana kehidupan. (Damsar & Indrayani, 2017, pp. 134–135)

Selain itu, ikatan kekeluargaan serta komunikasi antara migran dengan mereka yang ditinggalkan di daerah asalnya juga banyak menarik pendatang baru. Dilansir dari penelitian Gordon Temple dalam LEKNAS-LIPI pada tahun 1986 menggambarkan bahwa komunikasi informal serupa itulah yang banyak menarik pendatang baru. Kalau ada migran yang berhasil di Jakarta maka konsekuensinya adalah ia akan menarik saudara dan kenalannya sekampung untuk ikut mengadu untung. Hubungan demikian bersama dengan harapan memperoleh pekerjaan menjadi daya tarik Jakarta bagi kaum pendatang. (Oey, 1977, p. 7)

Namun rupanya alasan-alasan di atas tidak semua dianggap sama pentingnya. Berdasarkan hasil penelitian Gordon Temple diketahui bahwa alasan utama migran memilih Jakarta adalah karena kota ini dianggap memberi harapan paling besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan. Jakarta dianggap bisa menjadi kota yang membawa mimpi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. (Temple, 1986, p. 84)

Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu kota maka berbanding lurus pula permasalahan yang akan kota hadapi. Tiga masalah yang cukup krusial yang Jakarta hadapi adalah mengenai keterbatasan tempat tinggal, sampah dan banjir. Kompleksnya masalah tanah di Jakarta membuat sebagian besar warga pendatang Jakarta enggan memiliki tanah bahkan rumah. Ditambah lagi, regulasi untuk memiliki tanah melibatkan administrasi dan birokrasi yang melelahkan. Akibatnya, banyak warga pendatang Jakarta yang memutuskan untuk membangun rumah liar. Pembangunan rumah liar tentu tidak memerdulikan regulasi yang berlaku, asal bangunan berdiri dan tidak kehujanan. Maraknya pembangunan liar di Jakarta menjadi salah satu sebab terjadinya banjir di Jakarta dikarenakan banyak warga yang membangun rumah di sekitar sungai. Meskipun hal ini bukan merupakan faktor utama terjadinya banjir di Jakarta karena sebenarnya banjir sudah terjadi pada Zaman Kolonialisme. Hal ini dikarenakan karena kondisi geografis Jakarta yang rawan akan banjir, Jakarta merupakan dataran rendah yang terbentuk dari tanah aleuvial yang berasal dari endapan gunung berapi di Kota Bogor. Struktur tanah ini cenderung memiliki konsentrasi air yang tinggi. Ditambah, Jakarta dilintasi Sungai Ciliwung dan 12 sungai lainnya yang semakin membuat ketinggian tanah Jakarta menurun setiap tahunnya. Padahal, sebagai penanggulangannya, Jakarta sudah memiliki sistem kanal yang dirancang oleh Prof. Ir. Hendrik van Breen pada 1913 yang masih ada hingga kini. Tetapi, sistem kanal itu hanya mampu mengurangi intensitas banjir, bukan menghilangkan banjir sepenuhnya. (Gunawan, 2010, p. 19)

Banjir pertama yang menggenang Jakarta setelah kemerdekaan terjadi pada tahun 1950. Daerah Jakarta yang terendam banjir yakni Krukut, Rawa Terate, Lio, Pondok Dayung dan Gang Talip yang sekarang terletak di Jakarta Barat. Daerah tersebut merupakan daerah dengan penduduk pendatang padat yang sebagian besar rumahnya terletak di pinggir rawa atau sungai. Mereka cenderung tidak memedulikan bagaimana mengelola sampah yang baik dan regulasi pembuangan sampah. Pada awal tahun 1950, rata-rata sampah yang dihasilkan seluruh warga Kota Jakarta adalah 21.000 meter kubik perhari dan pengelolannya belum baik sepenuhnya. Sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai atau rawa. Sungai dan rawa-rawa tersebut akhirnya tercemar dan tersumbat sehingga akhirnya menyebabkan banjir di musim hujan. Banjir yang melanda tahun ini membuat daerah pemukiman ini kotor dan berbau tidak sedap. (Komarudin, 1999, p. 5)

Tidak hanya gemar membuang sampah sembarangan ke sungai. Warga Jakarta kala itu memiliki kebiasaan buruk yakni mandi dan membuang air kecil dan besar ke sungai. Hal ini bisa didasari karena rata-rata kondisi masyarakat Jakarta yang mendiami kawasan sungai merupakan masyarakat miskin. Mereka tidak mampu untuk membuat kamar mandi pribadi. Lama kelamaan hal ini membuat air sungai kotor dan menjadi sumber penyakit. Tidak hanya membuang kotoran ke sungai, sebagian warga Jakarta bahkan membuang kotorannya dengan cara membungkusnya dengan kertas koran, lalu membuangnya ke semak-semak atau kebon kosong. Tidak jarang pula pekerja bangunan membungkus kotorannya dengan kertas bekas semen, lalu membuangnya secara asal ke puing-puing bangunan. Bayangkan, betapa baunya kotoran yang mereka buang sembarangan itu. Apalagi jika terbawa angin, baunya sampai jauh. Ada kebiasaan warga Jakarta yang membahayakan kesehatan yakni seringkali mereka menahan BAB semalaman, hal ini karena mereka takut membahayakan diri jika memaksakan pergi ke sungai. (HM, 2016, p. 98)

Selain banjir, masalah lain yang cukup pelik yang Jakarta hadapi adalah kebakaran. Kebakaran yang cukup parah terjadi biasanya terjadi di perkampungan yang padat penduduk yang tidak teratur. Tidak kurang dari 67 kali kebakaran besar dengan korban 16.114 orang kehilangan rumah, bahkan kerugian diperkirakan mencapai 64 juta rupiah. Kebakaran paling hebat terjadi pada kampung-kampung yang padat, liar dengan tumpukan sampah atau kurang dipelihara. Warga-warga menyampaikan aspirasinya lewat koran-koran sejaman mengenai masalah ini. (Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977, p. 203)

Sayangnya, pada saat itu masalah banjir dan kebakaran belum dianggap sebagai masalah yang serius. Penanganan yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat temporal. Fokus pemerintah terbagi menjadi 2 karena pemerintah sendiri sudah memiliki rancangan pembangunan infrastruktur Jakarta yang disebut dengan *Outline Plan*. *Outline Plan* berisi 4 fokus pembangunan yang akan Pemerintah Jakarta buat berdasarkan permasalahan yang Jakarta alami diantaranya kekurangan lapangan kerja, masalah tata guna lahan dan bangunan seperti gedung pemerintahan (Blackburn, 1989, p. 270)

## **JAKARTA DI BAWAH GUBERNUR SAMPAH**

Setelah Kota Jakarta dipimpin oleh Sjamsuridjal, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Soemarno Sosroatmodjo. Saat Soemarno menjabat, bersamaan pula Kota Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Dengan hal ini, Soemarno merupakan gubernur pertama DKI Jakarta. Soemarno Sosroatmodjo merupakan seorang dokter tentara yang mengemban pendidikan dokter di NIAS atau Sekolah Dokter Hindia Belanda. Dengan dilantiknnya Soemarno sebagai gubrenur, Jakarta resmi dipimpin oleh seseorang berlatar belakang militer sekaligus kedokteran untuk pertama kalinya.

Di dalam struktural kemiliteran, jabatan terakhir yang diemban oleh Soemarno Sosroatmodjo sebelum menjadi gubernur DKI termasuk dalam Brigadir Jenderal berpangkat bintang 1. Dalam kepangkatan TNI-AD, Soemarno memiliki pangkat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan atasannya yakni Gatot Soebroto yang merupakan Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staff Angkatan Darat. Tetapi, peneliti berpendapat bahwa alasan terkuat mengapa akhirnya jabatan Gubenur DKI Jakarta dipercayakan kepada Soemarno adalah rekam jejaknya akan pengabdian yang tergolong banyak.

Pada awal masa jabatannya, Soemarno mendapat tantangan yang besar yakni menghadapi banjir yang menghadang di beberapa titik Jakarta. Mirisnya, banjir ini terjadi malam hari setelah upacara pelantikannya yang dilaksanakan pada 9 Februari 1960 (Lihat Lampiran 6). Banjir yang terjadi kala itu terjadi di kawasan Grogol. Sebanyak 40.704 orang penduduk memerlukan bantuan. Curah hujan sebesar 75mm mengguyur wilayah Grogol 12 jam tanpa hentinya. Ketinggian air bahkan mencapai 30 sentimeter di daerah Grogol dan Kali Angke 60 sentimeter. Bahkan, tempat tinggal anggota parlemen dan badan intelijen yang tidak jauh dari kawasan Grogol menderita paling parah karena air menyelonong ke dalam kamar-kamar hingga setinggi pinggang. Terlebih, kampung-kampung sekitarnya banjir melambung sampai ke atas rumah (Sosroatmodjo, 1981, p. 380)

Jawatan Penerangan menuturkan bahwa data yang tercatat dari kerusakan banjir di Grogol ini sebanyak 2.114 rumah rusak dan 15.290 orang mengungsi, di Jelambar sebanyak 1.858 rumah rusak serta 12.636 orang mengungsi serta di Kawasan Cengkareng sebanyak 692 rumah rusak dan 2.899 orang mengungsi. Daerah yang paling parah adalah kawasan Grogol tepatnya daerah perkampungan yang berlokasi disebelah Rumah Sakit Jiwa yang disebut Kampung Empang Bahagia dan Kampung Kramat. Kompleks gedung terparah yang terkena banjir adalah Jalan Makalele, Jalan Dr. Susilo dan Jalan Semeru dimana merupakan kompleks yang dihuni oleh anggota parlemen. Selain kerusakan yang dialami masyarakat Jakarta, masyarakat Jakarta juga dihadapkan oleh ketakutan baru yakni banyaknya binatang berbisa seperti ular dan kalajengking yang berkeliaran mencari tempat kering.

Pola kepemimpinan suatu pemimpin pasti banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya, hal ini terjadi pada Soemarno. Jika di dalam dunia kedokteran, pencegahan penyakit harus dilandasi langkah preventif dan kuratif. Hal ini Soemarno juga tetapkan dalam menangani banjir Jakarta. Setelah terjadi banjir di Grogol, Soemarno mengambil langkah kuratif membenahi Grogol secepat mungkin. Diantaranya bekerja sama dengan Departemen

Sosial untuk memberikan bantuan sebanyak Rp250.000 untuk warga Grogol, Cengkayang, Jelambar, Angke serta Krukut.

Tetapi, langkah preventif yang selanjutnya Soemarno ambil adalah pendirian Tim Asistensi Bencana. Tim ini terdiri dari para pemuda dan pegawai pamong praja yang sudah terlatih dalam hal penanggulangan bencana yang dijadikan sebagai pelatih. Uniknya, Soemarno juga melibatkan Barisan Pemadam Kebakaran, PMI, Badan Kebersihan DPU dan Dinas Sosial yang Soemarno sebut sebagai 'pelatih'. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Team Asistensi Bencana sebagai pelaku edukator dalam memberi edukasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan akan bencana

Selain pendirian Tim Asistensi, Soemarno juga membuat badan yang disebut dengan Kopro Banjir (Komando Proyek Banjir). Tugas Kopro Banjir adalah mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan mengendalikan banjir di Jakarta serta melakukan berbagai tindakan perbaikan pengaliran dan saluran, pembuatan tanggul-tanggul dan lain-lain dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir. Tidak hanya itu, Kopro Banjir juga turut menyediakan dapur umum untuk pengungsi banjir. Sebanyak 17 ton beras untuk sekali makan, sayur-sayuran, susu dan ikan asin. Dapur umum ini tersedia di beberapa titik yakni Lapangan Rinkes, Batalyon Brawijaya, Rumah Sakit Jiwa Grogol, Rumah Penjara Glodok, Cipinang, Bukit Duri serta Rumah Budi Cengkareng. Tim Kopro Banjir juga berhasil membangkitkan kepedulian dan kesadaran warga Jakarta untuk saling membantu. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan bantuan dari berbagai pihak

Beralih kepada segi infrastrukturnal, Kopro Banjir juga memiliki program kerja yakni pembangunan waduk. Dalam pelaksanaannya, Kopro Banjir membagi pekerjaan menjadi dua proyek yaitu proyek hilir dan proyek hulu. Proyek hilir merupakan proyek yang terfokus untuk normalisasi Sungai Cideng dan Sungai Krukut. Tujuan normalisasi sungai ini adalah untuk mengamankan pengalirannya yang mengalir ke daerah kota sehingga airnya nanti dapat dialihkan ke Waduk Pluit. Selain itu, ada pula proyek hilir yang berjangka pendek antara lain pengerukan Kali Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Grogol serta pembuatan saluran Muara Karang.

Adapun, proyek yang lebih besar adalah Proyek hulu. Proyek hulu mencakup pembuatan waduk, diantaranya Waduk Tebet, Waduk Melati dan Waduk Surabaya. Waduk Tebet dibuat dengan alasan bahwa daerah Tebet adalah daerah perkampungan baru yang belum terpikirkan bagaimana sistem pengairannya, padahal wilayahnya cukup dekat dengan Ciliwung. Hal ini diharapkan jika nanti musim hujan, air dari saluran Tebet Timur akan dialirkan terus sampai keluar pintu air Manggarai, sedangkan air dari saluran Tebet Barat ditampung di Waduk Tebet.

### **Kebijakan Rumah Minimum dan Pasar di Jakarta**

Soemarno mengerti betul bahwa sebagian besar warga Jakarta malas untuk memiliki rumah sendiri karena terbentur administrasi yang cukup panjang. Belum lagi, ada fenomena jual-beli SIP sejak masa kolonialisme, siapa saja yang memiliki SIP seakan-akan memiliki rumah pribadi. Calo SIP pun banyak bermunculan di Jakarta. Bahkan, ada fenomena yang menjengkelkan bahwa orang yang memiliki rumah sering tidak bisa menempati rumah kalau

Calo SIP sudah berkata orang lain yang berhak menempati rumah tersebut. Terbentuk pula stigma mengenai SIP dimana SIP seolah-olah abadi, turun temurun, dapat diwariskan, sehingga tidak ada gairah kepala keluarga dalam memiliki rumah sendiri.

Oleh karena itu, Soemarno akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa penghuni Jakarta yang ingin memiliki rumah dibebaskan dari SIP dengan catatan melakukan koordinasi kepada pemangku kebijakan setempat. Sehingga, perizinan untuk mendirikan rumah sangat mudah. Hal ini tentu bertujuan untuk membangkitkan semangat warga Jakarta untuk memiliki rumah layak huni di Jakarta.

Kemudian, kebijakan yang Soemarno buat adalah Proyek Rumah Minimum, proyek ini dialokasikan kepada masyarakat yang terkena penggusuran akibat pembangunan Asian Games. Sebagai langkah awal, Soemarno menentukan daerah yang strategis untuk pembangunan rumah minimum. 3 daerah yang Soemarno pilih yakni Cempaka Putih, Pulo Mas serta Tanjung Priok. Konsep rumah minimum sendiri adalah rumah yang memiliki tanah 100m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 90m<sup>2</sup> dan memiliki 2 lantai. Sehingga masih ada sisa tanah 60m<sup>2</sup> yang bisa dialokasikan untuk taman dan halaman. Rumah minimum ini merupakan rumah sementara yang kemudian dapat dikembangkan menjadi rumah besar. Kemudian, Soemarno juga bekerja sama dengan perusahaan besar seperti PT Pembangunan Ibukota Jakarta Raya (PT Jaya) untuk membangun rumah buruh yang dimintai oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dengan cara kolektif, pemerintah DKI Jakarta telah membangun rumah minimum. (Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977, p. 233)

Hasil penjualan rumah minimum dari pihak swasta, Soemarno gunakan untuk menguasai tanah di Cempaka Putih untuk pembangunan perumahan. Sebagai pengatur kewenangan, Soemarno memberikan kewenangan Cempaka Putih kepada badan yang disebut Otorita Cempaka Putih. Otorita Cempaka Putih memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah proyek menurut perumusan yang telah disusun dalam rangka landfirm bagi tanah perkotaan, dengan pengertian bahwa di tiap perkotaan ada tanah untuk kota yang berpenduduk padat. Di lokasi Proyek Otorita Cempaka Putih juga didirikan green belt yakni jalur hijau yang melingkari tanah kota dan ada tanah pedusunan.

Sementara, di luar green belt, tanah pedusunan disediakan untuk perkembangan kota lebih lanjut, umpamanya untuk kota-kota satelit. Di samping itu, kompleks perumahan di Cempaka Putih terdiri dari bangunan rumah flat yang berhalaman luas dengan tujuan sebagai tempat bermain anak-anak. Proyek Cempaka Putih ini didirikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.9975/BS tanggal 31 Mei 1961. Sampai akhir tahun 1965, tanah yang telah dibebaskan seluas ±100 hektar dari keseluruhan tanah yang disediakan seluas 235 hektar.

Tidak hanya di Cempaka Putih, Soemarno juga membangun Pulo Mas sebagai Kota Satelit. Pembiayaan dana Pulo Mas mendapatkan bantuan dari PBB dikarenakan Indonesia mendapatkan posisi anggota kehormatan. Dalam pelaksanaannya, sampai bulan Juni 1965 tanah yang telah dibebaskan tercatat seluas kurang lebih dari 280 HA dengan jumlah ganti rugi sebesar satu setengah milyar rupiah. Yang nantinya kelak akan dibangun perumahan-perumahan.

Sampai akhir masa jabatan Soemarno, pekerjaan yang telah diselesaikan adalah pengurangan tanah seluas kurang lebih 30 hektar, saluran pembuangan air sepanjang 2.500 m serta jalan utara dan jalan lingkungan seluas 54.085 m<sup>2</sup> dari 57.000m<sup>2</sup> yang ditargetkan. Rumah minimum seluas 44.932m<sup>2</sup> lantai dan di luar Cempaka Putih yakni Tanjung Priok dan Pulo Mas telah dibangun 254 rumah dengan luas lantai 13.166m<sup>2</sup>. Selain itu, juga ada beberapa rumah tambahan di daerah Bandengan Selatan, Taman Sari IV, Kebon Kelapa, Kebon Nanas, Kalibata, Raden Saleh, Mangga Besar, Cipete Ilir dan Tanjung Priok.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat Jakarta, Soemarno juga memerhatikan kebutuhan lain seperti pasar dan tempat rekreasi. Pada masa jabatannya, sekiranya ada 2 pasar besar yang menjadi 'warisan' yang dinikmati hingga kini. Pertama adalah Pasar Cikini, Pasar ini dipelopori oleh observasi Soemarno akan kegiatan jual beli di lapangan yang dahulu berada di dekat Pasar Cikini. Soemarno melihat bahwa jika kegiatan itu dilaksanakan tanpa koordinasi, akan menciptakan macet. Dilandasi hal itu, Soemarno melakukan perbaikan Pasar Cikini dengan menggandeng P.T Pembangunan Jaya.

Kepedulian Soemarno akan rakyat kecil juga terbukti pada pembangunan Pasar Cikini. Sebelum Pasar Cikini berdiri, jalan-jalan di sekitarnya dipenuhi oleh petani yang menggelar dagangannya satu hingga dua jam hingga dagangannya habis. Oleh karenanya, Soemarno berinisiasi untuk membuka lapangan besar yang diperuntukkan oleh pedagang tersebut dengan sewa harian yang sangat murah. Soemarno berharap dengan demikian petani tidak selalu keliling kampung untuk menjajakan barang hasil pertaniannya.

Selain Pasar Cikini, Soemarno juga memprakarsai revitalisasi Pasar Senen. Pasar Senen merupakan pilot proyek pasar yang kedua. Di daerah Senen ada dua macam toko yakni pertokoan yang lepas dari pasar dan lainnya toko-toko yang diadakan khusus karena adanya lapangan pasar. Disamping itu, Pasar Senen juga menjadi sentral akan kebutuhan sayur dan buah-buahan karena letaknya yang strategis dan dekat dengan jantung Ibu Kota Jakarta. Sebelum revitalisasi diadakan, Pasar Senen merupakan pasar dengan tingkat kesibukan dan kepadatan yang tinggi. Hal ini menjadikan tempat di Pasar Senen sangat kotor. Akhirnya, Soemarno mengambil langkah tegas untuk melakukan revitalisasi besar-besaran dengan tujuan menambah kenyamanan masyarakat Jakarta jika berbelanja ke pasar. Soemarno juga turut andil dalam pembangunan Ancol karena Soemarno merasa peduli dengan kebutuhan warga Jakarta khususnya dalam bidang rekreasi.

## **SIMPULAN**

Pada masa kepemimpinan seseorang dalam suatu daerah, tidak mungkin dapat menyelesaikan apa yang diharapkan oleh masyarakat seratus persen. Ada hal-hal yang dapat diselesaikan secara baik, ada yang sedang diselesaikan pada waktu mereka berhenti, tapi pasti ada pula kerja yang belum dimulai sama sekali. Tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu orang menyelesaikan apa yang menjadi cita-citanya maupun apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tiap-tiap pemerintahan pasti memiliki ciri khas yang ditentukan oleh keadaan.

Sebagai Ibu Kota, Jakarta selalu diselimuti masalah dari tahun ke tahun, bahkan sebelum merdeka. Komando dari penyelesaian ini tentu ditunjukkan kepada pemangku kebijakan pada era tersebut. Pada era Soemarno Sosroatmodjo. Selama 2 kali periode Soemarno menjabat sebagai Gubernur, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terlaksana, tetapi ada pula kebijakan yang belum berhasil dan nantinya akan diteruskan oleh penggantinya, Ali Sadikin. Dalam masa kepemimpinan Soemarno, kebijakan-kebijakannya sangat berporos kepada kepentingan masyarakat, hal ini selaras dengan pengertian politik tokoh bahwa seorang pemimpin akan selalu bertindak dan berpikir berdasarkan masa lalu, pengalaman kerja serta observasinya di lapangan. Soemarno memiliki latar belakang sebagai dokter tentara yang selalu berpikir preventif, represif dan kuratif. Hal ini banyak Soemarno terapkan dalam menyusun kebijakan.

Kebijakan yang menjadi ciri khas pada era Soemarno adalah kebijakan sampah yang berkaitan dengan banjir. Soemarno berhasil meningkatkan kesadaran warga Jakarta tidak hanya dalam penganggulangan banjir, tetapi juga edukatif dengan membuat Tim Asistensi. Kebijakan ini dinilai penulis sebagai kebijakan yang solutif dikarenakan bisa membangun pola pikir masyarakat dalam jangka waktu panjang, tidak bersifat temporal.

Soemarno juga meninggalkan warisan untuk masyarakat Jakarta yakni Pasar Senen, Pasar Cikini, Perumahan Cempaka Putih dan Cikini. Pembangunan pasar dan perumahan ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, Soemarno juga bisa mengimbangi antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakannya peneliti nilai seimbang dan berhasil hingga bisa kita nikmati hingga saat ini.

Peneliti menyimpulkan, kebijakan-kebijakan kepala daerah ke kepala daerah selanjutnya seharusnya bersifat kontinu bukan temporal. Seorang kepala daerah seharusnya mampu memprioritaskan apa saja kebutuhan masyarakatnya dan mampu berkompromi dengan kebijakan kepala daerah terdahulu untuk menyelesaikan masalah. Kegagalan kebijakan yang terjadi pada kepala daerah sebelumnya bisa menjadi evaluasi untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Bukan tidak mungkin, masalah-masalah perkotaan akan teratasi dengan baik jika penyelesaiannya terfokus pada satu solusi dan memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat Kabar

Merdeka. 1960. "60 Pet Tanah Pem. Pusat Diserahkan pada Pem Djakarta Raya." Edisi Pusat. 13 April 1960

\_\_\_\_\_. 1960. "Bantuan Pemerintah." Edisi Pusat. 2 Maret 1960

\_\_\_\_\_. 1960. "Gara-gara Takut Raungan Sirine Kamad Terdjun di Kalimati." Edisi Pusat. 16 Februari 1960

\_\_\_\_\_. 1960. "Ibukota Mulai Kemarin Disapu Pagi-Pagi Buta." Edisi Pusat. Edisi Pusat. 2 April 1960

\_\_\_\_\_. 1960. "Kerdjasama Swasta Dan Pem. Pertjepat Pembangunan. Edisi Pusat. 3 April 1960.

\_\_\_\_\_.1960. "Konperensi Nasional untuk Kebersihan Dibuka.". Edisi Pusat. 26 Februari 1960.

\_\_\_\_\_. 1960. "Pengangkatan Gubernur Jakarta dan Wakilnja.". Edisi Pusat. 8 Februari 1960.

\_\_\_\_\_. 1960. "Perkembangan dan Kemadjuan Pembangunan Stadion Asian Games.". Edisi Pusat. 4 Maret 1960

\_\_\_\_\_. 1960. "Perlombaan Kebersihan Diadakan Lagi Di Ibukota.". Mingguan Djaja. (1963). Banjir Djakarta Edisi Pusat. Edisi Pusat. 1 Maret 1960.

\_\_\_\_\_. 1960. "Ribuan Rumah Penduduk Rusak Akibat Bandjir di Ibukota". Edisi Pusat. 9 Februari 1960.

### **Buku**

Armistriani Soemarno. (1986). Bukit Kenangan

Blackburn, S. (1989). Jakarta : Sejarah 400 Tahun. Masup Jakarta.

Cindy Adams. (n.d.). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Damsar, & Indrayani. (2017). Pengantar Sosiologi Perkotaan. Kencana.

Downs, B. T. (1976). Politic, Change And Urban Crisis. Wadworth Publishing Company.

Farabih, F. (2005). Membayangkan Ibu Kota : Jakarta Di Bawah Soekarno .

Firman Muntaco. (2006). Gambang Jakarte. Suluh Indonesia.

Gunawan, R. (2010). Gagalnya Sistem Kanal : Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa. PT Kompas Media Nusantara.

HM, Z. (2016). Kisah-Kisah Edan Seputar Djakarta . CHANGE.

Komarudin. (1999). Membangun Kota Jakarta.

Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Penerbit Kiara Wacana.

Oey, M. (1977). "Jakarta Dibangun Kaum Pendetang." Prisma.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (1977). Karya Jaya : Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta (1945-1966).

Sedyawati, E., Rahardjo, S., & Johan, I. M. (1987). Sejarah Kota Jakarta 1950 - 1980.

Senjaya, P. (2019). Jakarta Smart City For Millenials 2045. PT Gramedia Jakarta.

Sihombing, B. F. (2018). Sejarah Hukum Tanah di Indonesia. Kencana.

Sosroatmodjo, S. (1981). Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya. Gunung Agung.

Temple, G. (1986). "Migrasi ke Jakarta" Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

Zed, M. (2017). Warisan Penjajah Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Kesenambungan). Diakronika Universitas Negeri Padang, 17, 1–14